



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 18 Februari 2020

Halaman: 2

Pemkot Tak Pahami Kondisi Warganya

KALANGAN legislator di DPRD Kota Jogja menilai kenaikan ketetapan PBB saat ini tidak tepat. Melihat kondisi di masyarakat saat ini. Mereka pun meminta Pemkot untuk bisa meninjau kembali atau menunda pelaksanaannya. "Saya kira Pemkot tidak memahami kondisi warga saat ini," ujar Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Jogja Sigit Wicaksana di kantor DPRD Kota Jogja kemarin (17/2). Menurut dia, saat ini masyarakat sudah dibebani dengan kenaikan harga sembako. Belum lagi kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga rencana kenaikan tarif PDAM di Kota Jogja. "Momentumnya yang tidak pas," lanjut dia.

Dia mengaku mendukung upaya Pemkot untuk melakukan *updating* penyesuaian harga tanah di Kota. Tapi dia kembali mengingatkan dampaknya ke warga. Termasuk

kondisi masyarakat saat ini. "Ada kondisi global juga yang membuat warga susah, jangan ditambah bebannya," pinta dia.

Sigit menyarankan, Pemkot untuk bisa melihat kemampuan ekonomi warganya saat ini. Ditakutkannya jika diterapkan, banyak warga yang akan kesulitan membayar. "Apalagi kenaikannya ada yang sampai berlipat-lipat," tuturnya.

Di kalangan legislatif sendiri mengaku belum pernah mendapat penjelasan dari Pemkot. Karena itu Sigit mendorong anggotanya yang ada di Komisi B, untuk segera memanggil organisasi perangkat daerah terkait di Pemkot untuk menjelaskan.

Ketika ditanyakan terkait sosialisasi yang diklaim sudah dilakukan, Sigit menilai banyaknya warga yang kaget dengan SPPT PBB Kota Jogja 2020 ini sebagai bukti tidak

efektifnya sosialisasi. Dia memperkirakan sosialisasi tidak langsung ke masyarakat. "Bisa juga sosialisasi hanya soal penyesuaian harga tanah tapi tak disampaikan dampaknya pada nilai PBB," ungkap dia.

Begitu pula terkait dengan target pendapatan asli daerah yang hendak dicapai Pemkot Jogja pada 2020 ini. Yang mencapai Rp 1 triliun. Meski ditargetkan naik, tapi Sigit meminta bukan memaksakan pada sektor PBB. "Pajak lainnya banyak, pajak hotel, restoran atau lainnya, jangan dibebankan langsung ke masyarakat," pintanya.

Karena itu, dia meminta ada evaluasi dari Pemkot terkait hal itu. Bahkan dia meminta supaya kenaikan PBB tersebut ditunda sementara waktu. SPPT PBB yang sudah disebar ditarik kembali. (wia/pra/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005